

Analisis Tantangan Manajemen Perubahan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Dompu

Hairul Rohimin¹, Ega Saiful Subhan², Risca Ariska Ramadhan³

^{1,2,3}Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jul 9, 2026

Revised Jul 17, 2026

Accepted Jul 25, 2026

Keywords:

Regional Government Information
System
Change Management
Regional Financial Management

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) from a change management perspective at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Dompu Regency. A qualitative research method with a descriptive approach was employed. Informants were selected purposively, specifically comprising employees who directly operate the SIPD. Data collection involved interviews, observation, and documentation, while data analysis utilized data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of SIPD supports change management at BPKAD Dompu Regency through alignment with national policies, adequate technological readiness, effective communication and coordination among employees, and positive competition that fosters improvements in employee competence and performance. Thus, the implementation of SIPD supports the organizational change process and enhances the effectiveness of regional financial management at BPKAD Dompu Regency.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hairul Rohimin,
Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali 1 Dompu.
Email: ruce17876@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem berbasis informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan anggaran, dan administrasi publik (Wulandari & Cahyono, 2025). Sistem Informasi Pemerintah Daerah, atau SIPD, merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan sebagai upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan terbuka (Puspitasari & Manurung, 2025).

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan keuangan daerah menuju sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Dalam praktiknya, penerapan SIPD di lingkungan BPKAD tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam pengelolaan data, tetapi juga memunculkan berbagai dinamika yang berkaitan dengan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, serta perubahan pola kerja aparatur. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pemahaman pegawai terhadap sistem, adaptasi terhadap fitur-fitur baru, serta hambatan teknis yang mempengaruhi kelancaran penggunaan SIPD dalam aktivitas sehari-hari.

Perubahan dari sistem sebelumnya menuju SIPD menuntut adanya penyesuaian yang tidak sederhana. Aparatur yang telah terbiasa dengan sistem lama cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru, sehingga memunculkan resistensi terhadap perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut aspek perilaku individu dan budaya organisasi (Akhiruddin *et al.*, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi salah satu penentu utama keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik (Anggreani *et al.*, 2024).

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang optimal juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat tantangan dalam implementasi SIPD. Pegawai yang tidak mendapatkan pemahaman yang cukup cenderung mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem secara maksimal. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan SIPD dalam mendukung kinerja organisasi (Muttaqin *et al.*, 2023; Jamal *et al.*, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi (Any *et al.*, 2025).

Fenomena lain yang juga muncul adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan kendala jaringan yang masih terjadi di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan proses input dan pengolahan data menjadi terhambat, sehingga berdampak pada efektivitas penggunaan sistem. Selain itu, koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan SIPD juga belum sepenuhnya berjalan optimal, yang menunjukkan adanya tantangan dalam aspek komunikasi organisasi. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa faktor teknis dan non-teknis merupakan dua aspek utama yang mempengaruhi implementasi sistem informasi pemerintah (Edward *et al.*, 2024).

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada dasarnya merupakan sebuah proses perubahan organisasi. Perubahan ini tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi baru, tetapi juga perubahan cara kerja, pola pikir, serta budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan manajemen perubahan yang mampu mengelola proses transisi tersebut secara efektif. Manajemen perubahan menjadi penting karena berperan dalam membantu individu dan organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga dapat meminimalisir resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap sistem baru.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi sistem informasi seperti SIPD merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transformasi digital di sektor publik diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik (Sine *et al.*, 2022). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan manajemen perubahan, kesiapan organisasi, serta faktor manusia (David *et al.*, 2019). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan yang terjadi.

Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta sistem informasi keuangan daerah memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Rohmi, 2025) menyoroti fungsi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan serta aset daerah, tetapi juga menemukan adanya masalah pada aspek infrastruktur dan pemahaman pengguna tanpa mengevaluasi proses perubahan organisasi yang terjadi. Selanjutnya, (Dewi & Wulandari, 2023) mengungkap tantangan dalam menerapkan SIPKD, yang sebagian besar diakibatkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan, namun penelitian mereka bersifat studi literatur dan belum mempertimbangkan dinamika perubahan di dalam organisasi. Di sisi lain, penelitian oleh (Awaliah *et al.*, 2025) yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Dompu lebih fokus pada hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan, tanpa menghubungkannya dengan pelaksanaan SIPD sebagai suatu proses perubahan sistem dan cara kerja. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan dalam penelitian terkait analisis tantangan manajemen perubahan dalam penerapan SIPD, khususnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meneliti pengalaman aparatur serta tingkat kesiapan organisasi di BPKAD Kabupaten Dompu.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan. Berbagai kendala seperti resistensi pegawai, keterbatasan kompetensi, serta kurangnya pelatihan menunjukkan bahwa manajemen perubahan belum berjalan optimal. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan SIPD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan yang ada serta mendukung perumusan strategi manajemen perubahan yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan manajemen perubahan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Dompu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Grand theory

Penelitian ini menggunakan teori manajemen perubahan Kurt Lewin yang dijelaskan oleh Burnes (2020) sebagai *grand theory* karena fokus penelitian membahas proses perubahan organisasi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Dompu. Model perubahan Lewin terdiri atas tiga tahapan, yaitu *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*. Tahap *unfreezing* merupakan proses mempersiapkan organisasi untuk meninggalkan sistem lama, tahap *changing* merupakan proses adaptasi pegawai terhadap penggunaan SIPD dalam pelaksanaan tugas, sedangkan tahap *refreezing* bertujuan menjadikan penggunaan SIPD sebagai budaya kerja yang stabil. Model ini relevan karena mampu menjelaskan tantangan implementasi SIPD, seperti resistensi pegawai, keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi teknologi, dan perubahan prosedur administrasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh model perubahan organisasi John Kotter yang dijelaskan oleh Crosthwaite (2021) yang menekankan pentingnya kepemimpinan, komunikasi, pembentukan visi perubahan, serta strategi implementasi yang terstruktur untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem informasi.

Manajemen perubahan

Manajemen perubahan merupakan tata kelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik (Bairizki *et al.*, 2021). Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata dasar *to manage* yang secara harfiah berarti mengelola. Sebagai kata benda manajemen dalam bahasa kita sering diartikan sebagai pemimpin (Widodo *et al.*, 2024). Perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur, atau manajer-manajer baru. Perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku (Putri *et al.*, 2021). Menurut Hertati *et al.* (2020) manajemen perubahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu globalisasi pasar, teknologi, jaringan sosial/perilaku, dan persaingan.

Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Hardiansyah & Jaffisa, 2024). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan Balqis & Fadhly (2021). Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang mampu diakses dari masyarakat serta menjadi landasan ketika pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Rohmi, 2025). Model kesuksesan sistem informasi dapat diukur dari enam faktor William H. DeLone & Ephraim McLean dalam Wisudiawan (2015) yaitu *system quality*, *information quality*, *information use*, *user satisfaction*, *individual impact*, *organization impact*.

Penelitian terdahulu

Penelitian oleh Alfarishi & Hartati (2024) yang berjudul analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Palembang terbukti efektif dalam mencapai tujuan, khususnya sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Penelitian oleh Nasution & Nurwani (2021) yang berjudul analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan program dari pemerintah Kota Medan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah lainnya, termasuk sistem bimbingan dan pengawasan pemerintah daerah.

Penelitian oleh Puspitasari & Manurung (2025) mengenai analisis penerapan sistem informasi pemerintah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan SDM dan dukungan infrastruktur teknologi untuk memaksimalkan potensi SIPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022) metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Karena bertujuan untuk memahami secara mendalam tantangan manajemen perubahan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat langsung dalam implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi terkait laporan keuangan dan regulasi yang berkaitan dengan SIPD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai tantangan manajemen perubahan dalam implementasi SIPD. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi serta proses penerapan SIPD di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi SIPD.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles *et al.* (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai.

Triangulasi Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu berlokasi di Jalan Beringin No. 1, Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu. BPKAD merupakan perangkat daerah yang

mempunyai tugas mengelola keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. BPKAD Kabupaten Dompu telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tahun 2014–2021. Secara organisasi, BPKAD terdiri atas satu sekretariat dan empat bidang, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Aset. Selain itu, BPKAD memiliki tugas menyusun APBD dan APBD Perubahan, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), menyusun LKPD, serta mengelola Barang Milik Daerah (BMD). BPKAD Kabupaten Dompu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan perangkat daerah yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga relevan dengan fokus penelitian ini.

Hasil wawancara **Globalisasi pasar**

Globalisasi pasar menggambarkan bagaimana kebijakan nasional yang diterapkan secara seragam melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memengaruhi pengelolaan daerah. Globalisasi pasar juga melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan proses penganggaran, pencairan, dan pelaporan keuangan dengan sistem yang telah distandarkan secara nasional.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa:

“Kebijakan-kebijakan nasional dalam SIPD ini sangat baik, terutama untuk Kabupaten Dompu sendiri karena pada dasarnya semua proses dari awal seperti penganggaran, pencairan, dan pelaporan itu sudah termasuk di dalam SIPD ini. Jadi Kabupaten Dompu sendiri tidak memakan waktu lama untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang diterapkan di nasional.” (Hasil wawancara, 2026).

“Secara karakteristik BPKAD Kabupaten Dompu tidak mengalami kesusahan karena balik lagi di SIPD ini semua terpapar dengan jelas apa yang harus dilakukan. Laporan-laporan, pencairan itu sudah terpapar dengan jelas. Jadi Kabupaten Dompu khususnya di BPKAD itu tidak perlu menyesuaikan dengan hal-hal yang lebih rumit lagi.” (Hasil wawancara, 2026).

“Pada dasarnya SIPD itu terdapat fitur laporan keuangannya. Nah untuk di laporan keuangan, SIPD ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat teliti. Jadi khususnya di bidang akuntansi saat ini, kepala bidang akuntansi tersebut tidak perlu memakan waktu lama lagi harus menyesuaikan laporan keuangan lokal dengan SIPD. Karena data yang tertata juga sudah terpapar dengan jelas, sudah detail dengan angka-angka realisasinya, angka-angka sisa belanja yang sudah di belanjakan.” (Hasil wawancara, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan nasional melalui SIPD mendukung pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu. Standarisasi sistem yang diterapkan secara nasional memudahkan proses penganggaran, pencairan, dan pelaporan keuangan sehingga tidak menimbulkan kendala berarti dalam penyesuaian karakteristik keuangan daerah maupun penyusunan laporan keuangan.

Teknologi

Teknologi mengkaji kesiapan infrastruktur teknologi seperti perangkat pendukung, jaringan, dan aplikasi, serta kendala teknis yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Dompu.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa:

“Sebelum menggunakan SIPD, di BPKAD ini dalam pencairan itu ada yang namanya case management system (CMS) yang menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Aplikasi SIMDA ini merupakan aplikasi lokal yang bisa diatur oleh kita sendiri. Namun berbeda pada saat penggunaan SIPD sekarang ini di BPKAD hanya memerlukan jaringan dan laptop saja, tidak memerlukan server lagi.” (Hasil wawancara, 2026).

"Untuk saat ini SIPD di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2026 SIPD sudah tergolong baik. Dulu itu masih ada beberapa permasalahan jaringan dari pusat, dan ini biasanya berhubungan langsung dari pusat, bukan kesalahan dari kita di sini." (Hasil wawancara, 2026).

"BPKAD Dompu tidak memiliki strategi khusus dalam mengatasi keterbatasan teknologi ini, karena balik lagi di BPKAD Kabupaten Dompu bisa dibilang fasilitas yang ada di sini cukup lengkap. jadi kami usahakan sebisa mungkin tidak ada keterbatasan teknologi." (Hasil wawancara, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan teknologi di BPKAD Kabupaten Dompu mendukung implementasi SIPD. Infrastruktur yang tersedia telah memadai kendala teknis yang pernah terjadi sebagian besar dari sistem pusat dan telah berkurang, serta dukungan fasilitas teknologi yang cukup lengkap memungkinkan implementasi SIPD berjalan dengan baik.

Jaringan Sosial/Perilaku

Jaringan sosial/perilaku mengkaji bagaimana pola komunikasi, koordinasi, perubahan perilaku kerja pegawai, serta budaya saling berbagi pengetahuan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Dompu.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa:

"Pada dasarnya komunikasi antara bidang di BPKAD Dompu sangat baik, mengingat semua bidang yang ada di sini saling berhubungan satu sama lain. Jadi sebelum dan sesudah SIPD ini komunikasi itu sudah baik. Tidak ada perubahan dari segi itu." (Hasil wawancara, 2026).

"Mungkin perilaku itu tidak spesifik balik lagi staf-staf yang ada di BPKAD Dompu ini sudah terlatih, sudah diberikan tata cara yang baik. Jadi ketika ada peralihan dengan SIPD tidak ada perubahan." (Hasil wawancara, 2026).

"SIPD di BPKAD ditunjuk langsung untuk beberapa orang yang menjadi admin jadi kebetulan ada saya sendiri. Admin itu bertugas untuk menjelaskan fitur-fitur terbaru atau memberikan solusi masalah-masalah yang dihadapi oleh pegawai yang ada di BPKAD Kabupaten Dompu." (Hasil wawancara, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaringan sosial dan perilaku kerja di BPKAD Kabupaten Dompu telah mendukung implementasi SIPD. Komunikasi dan koordinasi antara bidang tetap berjalan dengan baik, tidak terdapat perubahan perilaku kerja yang signifikan karena pegawai telah siap menghadapi perubahan sistem, serta budaya berbagi pengetahuan melalui peran admin SIPD membantu pegawai dalam memahami dan mengatasi kendala penggunaan sistem.

Persaingan

Persaingan mengkaji bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memengaruhi beban kerja, tuntutan kinerja pegawai, strategi dalam meningkatkan kompetensi, serta terciptanya persaingan positif antara bidang di BPKAD Kabupaten Dompu.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa:

"Menurut saya pribadi penggunaan SIPD ini sangat-sangat membantu dalam proses pencairan karena bisa memotong waktu yang lebih cepat dan proses pencairannya itu lebih teliti. Jadi meminimalisir." (Hasil wawancara, 2026).

"Strategi saya pribadi sering-sering membaca modul tentang kinerja, mengikuti diskusi, dan kegiatan yang diadakan oleh manajemen." (Hasil wawancara, 2026).

“Jelas menimbulkan persaingan positif antara bidang, karena balik lagi di BPKAD semua kita saling terkoneksi, saling berhubungan satu sama lain jadi tidak ada yang menonjol karena semua bidang memiliki kinerja yang terbaik.”(Hasil wawancara, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD mendukung peningkatan kerja di BPKAD Kabupaten Dompu melalui proses kerja yang lebih cepat dan akurat. Pegawai berupaya meningkatkan kompetensinya dengan mempelajari sistem secara mandiri dan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran. Selain itu penerapan SIPD mendorong terciptanya persaingan yang positif antara bidang tanpa mengurangi kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Pembahasan

Globalisasi Pasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Informan menjelaskan bahwa seluruh proses, mulai dari penganggaran, pencairan, hingga pelaporan, telah terintegrasi dalam SIPD sehingga memudahkan penerapan kebijakan nasional. Selain itu, BPKAD tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan karakteristik keuangan daerah karena seluruh prosedur telah tersedia secara jelas di dalam sistem. Fitur pelaporan SIPD juga mempermudah penyusunan laporan keuangan karena data telah tersusun secara rinci dan sistematis.

Temuan tersebut sejalan dengan teori manajemen perubahan menurut Hertati *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa globalisasi pasar mendorong organisasi menyesuaikan kebijakan, proses kerja, dan sistem agar mampu menghadapi perubahan lingkungan. Dalam penelitian ini, implementasi SIPD menjadi bentuk penyesuaian BPKAD Kabupaten Dompu terhadap kebijakan nasional yang diterapkan secara terintegrasi. Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan teori perubahan organisasi Kurt Lewin yang dijelaskan oleh Burnes (2020) khususnya pada tahap *changing*, yaitu ketika organisasi mulai beradaptasi dengan sistem kerja baru melalui penerapan SIPD.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Adisi & Sadad (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam implementasinya. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada manfaat SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Perbedaannya, informan pada BPKAD Kabupaten Dompu menyatakan bahwa implementasi SIPD tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam menyesuaikan kebijakan nasional maupun penyusunan laporan keuangan.

Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Laoli *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menemukan bahwa SIPD memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah secara terintegrasi. Perbedaannya lebih menitikberatkan pada analisis implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nias dan masih menemukan kendala pada aspek kualitas sistem serta pelayanan. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa informan di BPKAD Kabupaten Dompu tidak mengalami kendala yang berarti dalam menyesuaikan sistem dengan karakteristik keuangan daerah karena prosedur dalam SIPD telah berjalan dengan baik dan mendukung proses adaptasi organisasi terhadap perubahan kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa implementasi SIPD menunjukkan kemampuan BPKAD Kabupaten Dompu dalam beradaptasi terhadap perubahan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Adaptasi tersebut mencerminkan penerapan manajemen perubahan yang mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan terstandarisasi.

Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu didukung oleh kesiapan teknologi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum menggunakan SIPD, BPKAD memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang masih memerlukan pengelolaan secara lokal. Setelah menggunakan SIPD, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih sederhana karena hanya memerlukan jaringan internet dan laptop tanpa menggunakan server lokal. Informan juga menjelaskan bahwa kendala teknis yang pernah terjadi sebagian besar berasal dari sistem pusat dan saat ini telah banyak berkurang. Selain itu, fasilitas teknologi yang dimiliki BPKAD dinilai telah memadai sehingga tidak terdapat hambatan berarti dalam implementasi SIPD.

Temuan tersebut sejalan dengan teori manajemen perubahan menurut Hertati *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong organisasi melakukan perubahan. Penerapan teknologi baru menuntut organisasi menyesuaikan sarana, proses kerja, serta kemampuan sumber daya manusia agar perubahan dapat berjalan secara efektif. Temuan ini juga sesuai dengan teori perubahan organisasi Kurt Lewin yang dijelaskan oleh Burnes (2020), khususnya pada tahap *changing*, yaitu ketika organisasi mulai mengadopsi sistem baru dan menyesuaikan proses kerja dengan teknologi yang digunakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Puspitasari & Manurung (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan dukungan fasilitas kerja. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pentingnya dukungan teknologi dalam menunjang keberhasilan penerapan SIPD. Perbedaannya, penelitian di BPKAD Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa fasilitas teknologi telah tersedia dengan baik sehingga kendala implementasi lebih banyak berasal dari sistem pusat, bukan dari keterbatasan sarana di lingkungan organisasi.

Selain itu penelitian Anggreani *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem, kesiapan teknologi, serta kemudahan penggunaan aplikasi dalam proses administrasi keuangan daerah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pentingnya kesiapan teknologi sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi SIPD. Perbedaannya lebih menitikberatkan pada kualitas sistem informasi dalam proses administrasi keuangan, sedangkan penelitian ini mengkaji kesiapan teknologi sebagai bagian dari proses manajemen perubahan di BPKAD Kabupaten Dompu.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa kesiapan teknologi di BPKAD Kabupaten Dompu telah mendukung proses manajemen perubahan dalam implementasi SIPD. Infrastruktur yang memadai serta berkurangnya kendala teknis menunjukkan bahwa organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga implementasi SIPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Jaringan Sosial/Perilaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD didukung oleh komunikasi, koordinasi, dan perilaku kerja pegawai yang telah berjalan dengan baik di BPKAD Kabupaten Dompu. Informan menjelaskan bahwa komunikasi antarbidang tetap terjalin dengan baik sebelum maupun sesudah penerapan SIPD. Selain itu, perubahan sistem tidak menimbulkan perubahan perilaku kerja yang signifikan karena pegawai telah memperoleh pembekalan dan pelatihan sebelumnya. Budaya berbagi pengetahuan juga terlihat melalui peran admin SIPD yang secara aktif memberikan penjelasan mengenai fitur-fitur terbaru serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi pegawai.

Temuan tersebut sejalan dengan teori manajemen perubahan menurut Hertati *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa jaringan sosial dan perilaku merupakan faktor penting dalam keberhasilan perubahan organisasi. Komunikasi yang efektif, kerja sama antarpegawai, serta budaya saling berbagi pengetahuan akan mempermudah proses adaptasi terhadap sistem baru. Temuan ini juga sesuai dengan teori perubahan organisasi Kurt Lewin yang dijelaskan oleh Burnes (2020) khususnya pada tahap *refreezing*, yaitu ketika perubahan telah diterima oleh anggota organisasi dan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nasution & Nurwani (2021) yang menjelaskan bahwa implementasi SIPD memerlukan koordinasi yang baik antarunit kerja agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, penelitian Puspitasari & Manurung (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan dan komunikasi yang berkelanjutan. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pentingnya komunikasi dan kompetensi pegawai dalam mendukung implementasi SIPD. Perbedaannya, penelitian di BPKAD Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa komunikasi dan perilaku kerja pegawai telah terbentuk dengan baik sehingga proses adaptasi terhadap SIPD berlangsung tanpa hambatan yang berarti.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Any *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, komunikasi organisasi, serta pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kompetensi pegawai dalam mendukung implementasi SIPD. Perbedaannya lebih berfokus pada proses perencanaan anggaran di Pemerintahan Provinsi Jambi, sedangkan penelitian ini menekankan perubahan perilaku kerja, koordinasi antarbidang, dan budaya berbagi pengetahuan di BPKAD Kabupaten Dompu.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa komunikasi yang efektif, koordinasi antarbidang, serta budaya berbagi pengetahuan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi telah diterima oleh pegawai dan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Persaingan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai di BPKAD Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan SIPD membantu mempercepat proses pencairan, meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran mandiri, diskusi, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh manajemen. Selain itu, implementasi SIPD menciptakan persaingan yang positif antarbidang sehingga setiap bidang terdorong untuk memberikan kinerja terbaik tanpa mengurangi kerja sama.

Temuan tersebut sejalan dengan teori manajemen perubahan menurut Hertati *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa persaingan merupakan salah satu faktor yang mendorong organisasi melakukan perubahan menuju kinerja yang lebih baik. Persaingan yang sehat akan memotivasi individu untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Temuan ini juga sesuai dengan teori perubahan organisasi Kurt Lewin yang dijelaskan oleh Burnes (2020), khususnya pada tahap *refreezing*, yaitu ketika perubahan telah menjadi kebiasaan dalam organisasi dan mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Alfarishi & Hartati (2024) yang menyatakan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan apabila didukung oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Selain itu, penelitian Puspitasari & Manurung (2025) menjelaskan bahwa penerapan SIPD mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada meningkatnya kompetensi dan efektivitas kerja setelah implementasi SIPD. Perbedaannya, penelitian di BPKAD Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa penerapan SIPD juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat antarbidang sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Selain itu penelitian Wulandari & Cahyono (2025) menunjukkan bahwa implementasi SIPD mendorong peningkatan kompetensi pegawai serta menciptakan proses kerja yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada peningkatan kompetensi aparatur dan efektivitas kinerja setelah implementasi SIPD. Perbedaannya berfokus pada pengalaman pengguna SIPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini menyoroti munculnya

persaingan positif antarbidang yang mendorong peningkatan kinerja pegawai sebagai bagian dari manajemen perubahan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa implementasi SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membangun budaya kompetitif yang positif di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi telah diterima dengan baik sehingga mampu mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Dompu telah mendukung proses manajemen perubahan. Hal ini ditunjukkan oleh kemudahan penyesuaian terhadap kebijakan nasional, kesiapan teknologi yang memadai, komunikasi dan koordinasi antarpegawai yang berjalan baik, serta adanya persaingan positif yang mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Dengan demikian, implementasi SIPD mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Dompu. BPKAD Kabupaten Dompu diharapkan terus meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan SIPD serta mempertahankan komunikasi dan koordinasi antarbidang agar implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal. Penelitian selanjutnya untuk memperluas objek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih luas.

REFERENSI

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- Agung, G., Wisudiawan, A., Informatika, F., Telkom, U., Delone, M., Seddon, M., & Moment, P. P. (2015). *Analisis faktor kesuksesan sistem informasi menggunakan model delone and mclean*. II(1), 55–59. <https://doi.org/10.33197/jitter.vol2.iss1.2015.71>
- Akhiruddin, D. R., Negara, E. S., & Sutabri, T. (2023). *Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan Metode End-User Computing Satisfaction (EUCS)*. 9(2), 834–848. <https://doi.org/10.37012/jtik.v9i2.1776>
- Alfarishi, A. F., & Hartati, S. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan. *EKSISTANSI*, 13(1), 34–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14062597>
- Anggreani, A. K., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). *Implementation Of Sistem Informasi Local Government (SIPD) In The Process Of Financial Administration*. 5(2), 912–923.
- Any, A., Amiwita, A., & Suryani, A. I. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Proses Perencanaan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 13(2), 474–487. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i2.715>
- Awaliah, J., & Ramadhan, M. S. (2025). *Economics and Digital Business Review terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD*. 6(2), 1395–1410. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2786>
- Bairizki, A., Irwansyah, R., Arifudin, O., Asir, M., Ganika, W. G., Karyanto, B., & Lewaherilla, N. (2021). *Manajemen perubahan*. Penerbit Widina.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). *Jurnal Public Policy Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat*. 2. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Burnes, B. (2020). The Origins of Lewin's Three-Step Model of Change. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 56(1), 32–59. <https://doi.org/10.1177/0021886319892685>
- Crosthwaite, D. S. C. (2021). Minimising Risk—The Application of Kotter's Change Management Model on Customer Relationship Management Systems: A Case Study. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(10), 496. <https://doi.org/10.3390/jrfm14100496>
- David, Y. Y., Ohoiwutun, Y., Development, R., Agency, P., Regency, A., Management, D., Agency, D. P., & Organizations, R. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. 55–67. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i1.2426>
- Dewi, G. A., Agung, A., & Intan, A. (2023). *Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan*

- Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali*. 8(2), 106–111.
<https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.4619>
- Edward, A. V., Akbar, W. S., Marantika, J., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Penerapan Kebijakan Aplikasi SIPD Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2614–2620. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>.
- Hardiansyah, R., & Jaffisa, T. (2024). *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan (Studi Kasus Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan)*. 4, 5194–5206.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13709>
- Hertati, L., Syafarudin, A., & Safkaur, O. (2020). Peran Manajemen Perubahan Pada Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus Corona: Peran Manajemen Perubahan Pada Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus Corona. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 06(02), 106–124.
<https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.6355>
- Jamal, F. H., Mahmud, & Marlina, L. (2026). Digital Attendance System Implementation, Employee Competence, and Work Discipline on Government Employee Performance. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 694–705. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v4i3.858>
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran) SIPD Implementation In Regional Financial Management In Nias District (Case Study Of BPKPD As The Leading Budgeting Sector). *Jurnal EMBA*, 10(4), 1381–1389.
- Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael, Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muttaqin, I., Adiranti, U., Dewi, R., & Rf, Z. (2023). *Issn 2460 – 9* (77), 2310–2318.
- Nasution, M. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). *Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. 9 (77). <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Puspitasari, D. A., & Manurung, H. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.61696/jusapak.v3i1.692>
- Putri, D. E., Arta, I. P. S., Silaen, N. R., Simatupang, S. L., Tubagus, S., Setiawan, U., ... & Fitriani, F. (2021). *Manajemen Perubahan*.
- Rohmi, P. K. (2025). *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(3), 155–162. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.86>
- Sine, M. M., Maria, E., Informasi, F. T., Informasi, S., Kristen, U., & Wacana, S. (2022). *Analisis Manajemen Risiko pada Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Menggunakan IEC / ISO 31010 : 2019*. 4(1).
<https://doi.org/10.47065/bits.v4i1.1531>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widodo, Z. D., Santosa, S., Novianti, R., Lusiana, H., Sudirman, A., Silaen, N. R., ... & Sirine, H. (2024). *Manajemen Perubahan*. Penerbit Widina.
- Wulandari, D. S., & Cahyono, D. (2025). Eksplorasi Pengalaman Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 10 (2), 100–112.